

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang. 2019. *Kabupaten Magelang Dalam Angka*. BPS Kabupaten Magelang. Magelang.
- Basah, Sjahran. 1995. *Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi*, Makalah pada Penataran Hukum Administrasi dan Lingkungan di Fakultas Hukum Unair. Surabaya.
- HR, Ridwan. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Rajagrafindo Persada. Jakarta
- Marbun, S.F. 2013. *Hukum Administrasi Negara II*. FH UII Press. Yogyakarta
- Marzuki, Peter Mahmud. 2006. *Penelitian Hukum*. Kencana. Jakarta
- Mulyadi, Deddy. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Penerbit Alfabeta. Bandung
- N. M Spelt dan J. B. J. M ten Berge. 1993. *Pengantar Hukum Perizinan*, disunting oleh Philipus M. Hadjon. 1993. *Pengantar Hukum Perizinan*. Yundika. Surabaya
- Nuriyanto A. Daim. 2019. *Hukum Perizinan Pelayanan Perizinan Terpadu Berbasis Teknologi Informasi dalam Perspektif Good Governance*. LaksBang Justitia. Yogyakarta
- Pudyatmoko, Y Sri. 2009. *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta
- Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Penerbit Gava Media. Yogyakarta
- Putra, Ida Bagus Wyasa, *et.al.* 2003. *Hukum Bisnis Pariwisata*. PT Refika Aditama. Bandung.
- Soehino. 2000. *Asas – Asas Hukum Tata Usaha Negara*. Liberty. Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum* (Cetakan Tahun 2015). Penerbit Universitas Indonesia. Jakarta.
- _____ dan Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. PT Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Subarsono. 2006. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta

Suryabrata, Sumadi. 1988. *Metodologi Penelitian*. CV Rajawali, Jakarta.

Sutedi, Andrian. 2017. *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. Sinar Grafika. Jakarta.

Utrecht, E. 1957. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. PT Ichtiar Baru. Jakarta.

Widodo, Joko. 2007. *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Bayumedia Publishing. Malang. hlm.107.

B. Peraturan Perundang – Undangan

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724)

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966).

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5262)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6215).

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956).

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata.

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 935).

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 59).

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 65)

Peraturan Bupati Magelang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Magelang. (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 21).

C. Artikel Jurnal

Dewi, Dyah Adriantini Sintha. “Optimalisasi Pelayanan Publik di Bidang Perizinan”. *Jurnal Masalah – Masalah Hukum*. Volume 45 Nomor 1. 2016.

Ekawati, Sulistya. “Benarkah Desentralisasi Meningkatkan Pelayanan Publik? (Study Persepsi Perusahaan Kehutanan Terhadap Pelayanan Pemerintah Sebelum dan Setelah Desentralisasi)”, *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*. Volume 14 Nomor 1. Mei 2017.

Handayani, Marini Tri. “Kajian Hambatan Jalur Regulasi Perizinan dan Birokrasi di Indonesia”. <https://www.researchgate.net/publication/336700455>. Oktober 2019.

Nuriyanto. “Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia, Sudahkah Berlandaskan Konsep “Welfare State”?”. *Jurnal Konsituism*. Volume 11 Nomor 11 September. 2014.

Suhayati, Monika. “Permasalahan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)”. *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*. Volume V Nomor 23. Desember 2018.

D. Hasil Penelitian

Indra. 2017. *Pelaksanaan Izin Usaha Pariwisata di Kota Makassar*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar.

Sianipar, Nikita Kathryn. 2019. *Proses Perizinan Perseroan Terbatas Setelah Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

World Bank, Doing Business 2008, Comparing Regulation in 178 Economies: Indonesia, 2008

E. Internet

DPMPTSP dan Naker Pangkalpinang. Panduan Penggunaan OSS. <https://dpmptspnaker.pangkalpinangkota.go.id/wp-content/uploads/2020/04/Panduan-Penggunaan-OSS.pdf>. Diakses pada tanggal 5 Juli 2020.

Fajar, Taufik. “Ternyata Ini Kendala Perizinan Online Terpadu di Daerah”. <https://economy.okezone.com/read/2019/03/06/320/2026587/ternyata-ini-kendala-perizinan-online-terpadu-di-daerah>. Diakses pada tanggal 14 Januari 2020.

Gewati, Mikael. “BI: Industri Pariwisata Jadi Sektor Paling Hasilkan Devisa”, <https://travel.kompas.com/read/2019/03/23/084500627/bi--industri-pariwisata-jadi-sektor-paling-hasilkan-devisa>. Diakses pada tanggal 15 Januari 2020.

Heriani, Fitri Novia. Pelaksanaan OSS di Daerah Harus Lewat PTSP Sistem OSS Masih Terus Disempurnakan, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c76a699062e0/pelaksanaan-oss-di-daerah-harus-lewat-ptsp/>. Diakses pada tanggal 10 April 2020.

_____. Sistem OSS Versi Terbaru Bakal Hadir Sempurnakan Sistem Sebelumnya.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d3935cf10efa/oss-versi-terbaru-bakal-hadir-sempurnakan-sistem-yang-lama/>. Diakses pada 3 Juli.

_____. Potensi Masalah Hukum Pasca Terbitnya PP Perizinan Terintegrasi.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b46e638b08e5/potensi-masalah-hukum-pasca-terbitnya-pp-perizinan-terintegrasi?page=all>.

Diakses pada 17 Juli 2020.

Kareem, Aryandra. Aturan Terbaru Pendirian Perusahaan dan Izin Usaha di Tahun 2019. <https://www.easybiz.id/aturan-terbaru-pendirian->

[perusahaan-dan-izin-usaha-tahun-2019/](#). Diakses pada tanggal 17 Juni 2019.

_____. Setahun OSS di Mata User. <https://www.easybiz.id/setahun-oss-di-mata-user/>. Diakses pada tanggal 17 Juli 2020.

Portal Informasi Indonesia. Perizinan Berusaha Melalui OSS, <https://indonesia.go.id/layanan/investasi/sosial/perizinan-berusaha-melalui-oss>. Diakses pada 3 Juli 2020.

Portal Informasi Indonesia, Prosedur Mengurus Amdal, <https://indonesia.go.id/layanan/kependudukan/ekonomi/prosedur-mengurus-amdal>, diakses pada 18 September 2020.

Portal Informasi Indonesia, OSS 1.1 dan Kamus OSS, <https://indonesia.go.id/layanan/kependudukan/sosial/oss-1-1-dan-kamus-oss>. Diakses pada 3 Juli 2020.

Putri, Amanda Lauza. Konsekuensi Jika Perusahaan Tidak Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), <https://smartlegal.id/smarticle/2019/03/12/tidak-memiliki-nomor-induk-berusaha-nib/>. Diakses pada tanggal 20 Juni 2020.

Sakti, Guntur. Siaran Pers: Kabupaten Magelang Jadi Mesin Penggerak Pariwisata Wilayah Joglosemar. <http://www.kemenparekraf.go.id/index.php/post/siaran-pers-kabupaten-magelang-jadi-mesin-penggerak-pariwisata-wilayah-joglosemar>. Diakses pada tanggal 7 Maret 2020.